



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/0451 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekalongan maka Keputusan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan
- b. Bahwa pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksa pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja kota Pekalongan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang

Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Pejabat Pelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
 2. Mengkoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi
 - b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta emrta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi;

6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID dan;
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; dan
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Data dan Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/arsip informasi publik;
 2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melaksanakan proses penyimpanan

- pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik; dan
4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; dan
 3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-government; dan
 2. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

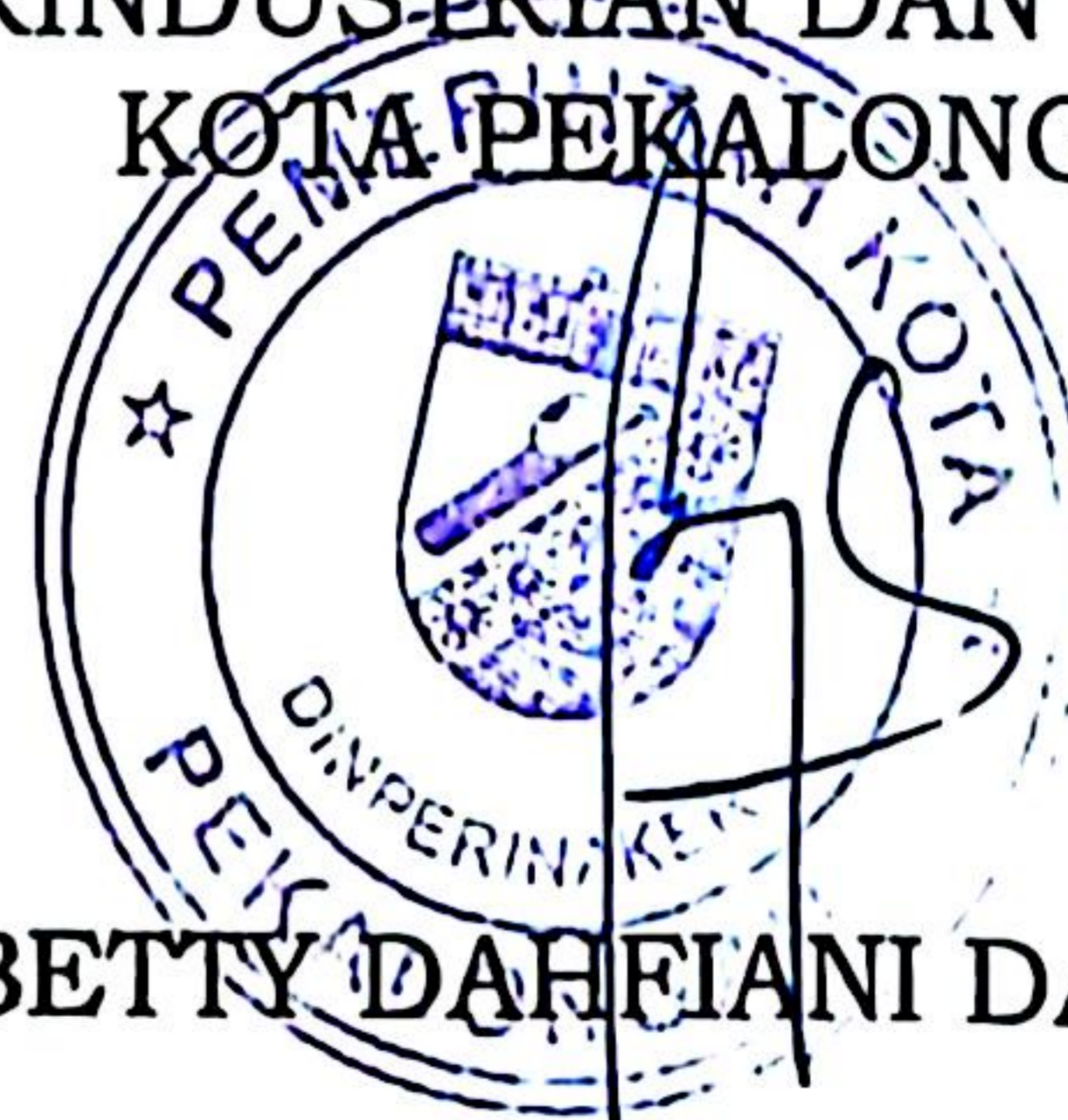
KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHIANI DAHLAN

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.12/0451 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN TAHUN
 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KOTA PEKALONGAN
 TAHUN 2026

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan/ Instansi
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Renval dan Keuangan
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penempatan Kerja dan Produktivitas
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Penempatan Kerja dan Produktivitas
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perindustrian
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Perindustrian
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Subbag Umum dan Kepegawaian
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala UPTD BLK
	Anggota	3 (tiga) orang tenaga pelaksana pada UPTD BLK

Ditetapkan di Pekalongan
Pada Tanggal 15 Januari 2026

a.n WALL KOTA PEKALONGAN

KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN



BETTY DAHFIANI DAHLAN